BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Tempo
Subyek : Kehutanan
Edisi : 07 Mei 2008
Halaman : A9

Izin Tiga Perusahaan Hutan Tanaman Industri Dicabut

Mereka tidak melakukan penanaman kembali.

BANJARMASIN - Tiga dari empat perusahaan yang mendapat izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Selatan dicabut izinnya. "Menteri Kehutanan telah menyetujui pencabutan izin itu," kata Nafarin, Kepala Bidang Program Penghijauan dan Hutan Tanaman Industri Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, di Banjarmasin kemarin.

Menurut dia, perusahaan yang izin HTI-nya dicabut adalah PT Gunung Meranti di Tabalong, PT Pas Porest yang memiliki izin HTI seluas 2.000 hektare di Kabupaten Tanah Bumbu, dan PT Budi Wana Lestari dengan izin HTI seluas 7.000 hektare di Kabupaten Tanah Bumbu.

"Satu perusahaan lagi masih menunggu keputusan," ucap Nafarin. Perusahaan itu adalah PT Dwima Intiga dengan luas lahan 5.000 hektare.

Nafarin menjelaskan, perusahaan yang dicabut izinnya karena tidak melakukan penanaman kembali. Sebelum mengusulkan pencabutan izin itu, pihaknya terlebih dulu memanggil semua perusahaan itu. Mereka diminta menanam kembali di lahan HTI. Karena permintaan itu tidak dilaksanakan, Dinas Kehutanan mengusulkan pencabutan izin HTI itu ke Menteri Kehutanan.

Saat ini, Nafarin melanjutkan, pemegang HTI di Kalimantan Selatan yang aktif melakukan penanaman kembali tinggal sembilan perusahaan.

Dari Sulawesi Tengah dilaporkan, kepolisian setempat menggagalkan penyelundupan kayu hitam (ebony) sebanyak 900 batang, yang hendak diselundupkan ke Tawau, Malaysia. Juru bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Irfaizal Nasution, menyatakan kayu ebony berdiameter 15 sentimeter dengan panjang 2 meter itu dibuang oleh pemiliknya di tengah laut ketika polisi mengejar mereka pada akhir April lalu.

“Dua kapal yang membuang kayu itu kabur. Kami masih memburunya,” kata Irfaizal. Peristiwa itu terjadi di perairan Pantai Barat, Kabupaten Donggala, akhir April lalu. Pihaknya terus memantau perairan Pantai Barat karena sering dijadikan daerah penyelundupan kayu ebony ke Malaysia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta kayu hasil pembalakan liar di 14 kabupaten kota yang telah dilelang, dua pertiganya dapat diberikan ke daerah untuk pembangunan. “Sebab, kini daerah kami krisis bahan baku kayu,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ahmad Diran kemarin. Selama ini kayu hasil penertiban pembalakan liar yang telah dilelang biasanya dibawa keluar Kalimantan Tengah oleh pemenang lelang. **ENI SAENI| KHAIDIR RAHMAN | DARLIS |KARANA WW**

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup